

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada iklim usaha yang memungkinkan berbagai pelaku usaha melaksanakan aktivitasnya dengan lancar. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang (*developing country*) sangat fokus untuk memajukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Iklim usaha yang kondusif diupayakan oleh Pemerintah dengan menerbitkan peraturan - peraturan yang memudahkan investasi, serta regulasi - regulasi lain yang memudahkan pelaku usaha meningkatkan skala usaha. Hal ini akan memiliki dampak dalam berbagai hal terutama dalam penurunan pengangguran dan peningkatan entitas - entitas baru yang melaksanakan usaha di Indonesia. Peningkatan jumlah entitas usaha karena iklim usaha yang kondusif tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu bentuk usaha yang berperan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan penggerak ekonomi negara dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran. Sesuai dengan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia pada tahun 2019, pertumbuhan UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 1,98% dengan jumlah 1.271.440 unit UMKM. Persentase perkembangan UMKM tersebut juga diiringi oleh dampak positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu sebesar 5,72% atau Rp518.813,3 milyar.

Jumlah UMKM dan pertumbuhan UMKM harus diikuti oleh peningkatan dalam tata kelola UMKM. Salah satu unsur dari tata kelola UMKM adalah tata

kelola keuangan. Tata kelola keuangan wajib didukung oleh data keuangan yang obyektif dan valid sehingga UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang tepat. Laporan keuangan menjadi unsur penting dalam tata kelola sehingga UMKM diharapkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk UMKM, yaitu SAK EMKM. Dalam mengelola laporan keuangannya, pelaku UMKM seringkali mengabaikan standar akuntansi yang telah disusun untuk proses bisnis mereka. Kendala utama bagi pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang selaras dengan SAK EMKM adalah terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi.

Pada tahun 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menyusun dan membentuk Standar Akuntansi Keuangan dari Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini merupakan bentuk dukungan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, manfaat penggunaan standar akuntansi akan memberikan informasi keuangan dan kinerja lebih akurat yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi bagi investor atau kreditor, serta bentuk tanggung jawab suatu entitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Adanya SAK EMKM juga akan berdampak baik karena akan mudah untuk mendapatkan pembiayaan pemerintah agar UMKM dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Marwati (2018) tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada Penyusunan Laporan Keuangan UD. Sakiah Jaya menunjukkan bahwa masalah dalam penerapan SAK EMKM adalah pemahaman tentang penyusunan laporan

keuangan masih rendah. Pemilik UMKM juga mengaku tidak mengetahui pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ilmu akuntansi. Hal itu terjadi karena pemilik mengaku bahwa penyusunan laporan keuangan tidak penting bagi perusahaannya bahkan tidak mengetahui tujuan dari penyusunan suatu laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan di Saf Handicraft, yang merupakan sebuah usaha berbentuk UMKM yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembuatan jenis karya kerajinan dengan menggunakan bahan limbah alam serta pembuatan mebel, masih melakukan pencatatan laporan keuangan secara konvensional dan belum mengimplementasikan standar karena kurangnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang terkait.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Penyusunan Laporan Keuangan di Saf Handicraft”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SAK pada Saf Handicraft yang sesuai dengan SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran proses pencatatan, pembukuan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Saf Handicraft yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dari proses penerapan SAK EMKM pada Saf Handicraft.

b. Bagi Saf Handicraft

Penelitian ini sangat diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi dasar/acuan atau bahan pertimbangan mengenai SAK EMKM untuk diterapkan dalam tahapan penyusunan laporan keuangan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan referensi bagi masyarakat pelaku UMKM mengenai penerapan SAK EMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan ruang lingkup bertujuan agar topik permasalahan yang dikaji oleh penulis tidak menyimpang dari topik yang telah ditentukan sebelumnya. Ruang lingkup penelitian ini yaitu proses pencatatan transaksi, pembukuan akuntansi, dan proses penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM pada satu periode tertentu.